

ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI DESA SIDODADI KECAMATAN WONOMULYO

Analysis of Community-Based Waste Management System in Sidodadi Village, Wonomulyo Subdistrict.

Abdullah Muthi Tanreso^{1*}, Natsar Desi², Muh. Chaerul³

^{1,2,3}Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar.

*Email: mtanreso@gmail.com

Abstrak

Penerapan sistem pengelolaan sampah yang efektif merupakan elemen krusial dalam pembangunan lingkungan desa yang sehat dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo secara sistematis, faktual, dan akurat. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif sederhana. Populasi penelitian melibatkan tiga komponen utama pemangku kepentingan di Kecamatan Wonomulyo, yaitu masyarakat (penduduk lokal), pemerintah (pegawai camat, aparat desa, dan dinas pekerjaan umum bidang lingkungan hidup), serta pihak swasta (wiraswasta lokal). Data dikumpulkan melalui instrumen kuesioner dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, khususnya aspek pewadahan dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), masih belum memadai dan tidak sesuai dengan harapan responden, meskipun kesadaran mandiri di tingkat rumah tangga telah terbentuk. Selain itu, sistem operasional pengelolaan sampah belum berjalan optimal akibat tidak teraturnya jadwal pengumpulan dan pengangkutan, serta masih rendahnya penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pengelolaan sampah yang efektif di Desa Sidodadi adalah model berbasis masyarakat yang terintegrasi secara sinergis dengan dukungan pemerintah melalui penguatan fasilitas, penjadwalan operasional yang rutin, dan peningkatan pengawasan.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Berbasis Masyarakat, Sarana Prasarana, Prinsip 3R.

Abstract

The implementation of an effective waste management system is a crucial element in sustainable and healthy village environment development. This study aims to systematically, factually, and accurately describe and explain the condition of the community-based waste management system in Sidodadi Village, Wonomulyo District. The methodology employed is descriptive research with a qualitative approach, supported by simple quantitative data. The research population involves three main stakeholder components in Wonomulyo District, including the community (local residents), government (sub-district, village, and

environmental Public Works department officials), and the private sector (local entrepreneurs). Data were collected through questionnaires and field observations. The results indicate that the availability of waste management facilities and infrastructure, particularly regarding waste bins and temporary disposal sites (TPS), remains inadequate and does not meet respondents' expectations, although independent awareness at the household level has emerged. Furthermore, the operational waste management system functions sub-optimally, characterized by irregular collection and transportation schedules and low implementation of the 3R (Reduce, Reuse, Recycle) principles. This study concludes that the effective waste management model for Sidodadi Village is an integrated community-based model synergized with government support through infrastructure reinforcement, routine operational scheduling, and enhanced monitoring.

Keywords: Waste Management, Community-Based, Infrastructure, 3R Principles.

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan salah satu tantangan lingkungan krusial yang terus meningkat di Indonesia, didorong oleh pertumbuhan penduduk, eskalasi aktivitas ekonomi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbulan sampah nasional telah mencapai sekitar 70 juta ton per tahun. Menanggapi situasi tersebut, kebijakan nasional kini menekankan pentingnya pergeseran paradigma melalui pendekatan pengurangan sampah langsung dari sumbernya, pengelolaan terpadu dari hulu ke hilir, serta penguatan partisipasi berbasis komunitas. Keterlibatan aktif masyarakat dinilai sebagai strategi fundamental untuk mengurangi beban sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir persampahan yang kian terbatas secara nasional.

Di tingkat regional, Provinsi Sulawesi Barat menempatkan sektor pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026, dengan fokus utama pada perluasan layanan dan penguatan infrastruktur lokal. Namun, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi kendala struktural yang akut. Di Kabupaten Polewali Mandar, data Sistem Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga masih didominasi oleh metode konvensional yang tidak ramah lingkungan, seperti pembakaran (62%) dan pembuangan ke lahan kosong (12,3%), sedangkan sampah yang berhasil dikumpulkan hanya berkisar 10,1%. Padahal, volume timbulan sampah di kabupaten ini tergolong masif, yakni mencapai 9.513,835 ton pada tahun 2024 dan 7.164,117 ton pada tahun 2025. Krisis persampahan ini mencapai titik kritis ketika satu-satunya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di wilayah Kabupaten Polewali Mandar resmi ditutup sejak tahun 2021 akibat keterbatasan kapasitas, sehingga penanganan sampah kini bertumpu pada inovasi pengelolaan di tingkat domestik. Penutupan TPA tingkat kabupaten tersebut menuntut akselerasi strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tingkat kecamatan dan desa sebagai garda terdepan. Kecamatan Wonomulyo, khususnya Desa Sidodadi, menjadi wilayah strategis yang terus mengembangkan pendekatan berbasis komunitas ini.

Secara fisik, infrastruktur penunjang berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebenarnya telah tersedia di beberapa titik krusial, meliputi wilayah Padi Unggul, Kesadaran, dan area pasar desa. Keberadaan TPS tersebut dirancang sebagai simpul pengumpulan lokal untuk mengomodasi limbah domestik dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kendati demikian, efektivitas operasional, dinamika partisipasi warga, serta keterpaduan sistem pengelolaan di Desa Sidodadi sejauh ini belum dikaji secara komprehensif pasca-terjadinya krisis penutupan TPA di tingkat kabupaten. Berdasarkan kesenjangan (research gap) antara regulasi normatif yang mendorong kemandirian desa dengan realitas tingginya praktik pembakaran sampah serta keterbatasan akses penanganan baku, maka analisis mendalam mengenai sistem yang berjalan di tingkat tapak mutlak diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dipetakan kondisi aktual di lapangan, diidentifikasi aspek-aspek kelembagaan dan operasional yang perlu diperkuat, serta dirumuskan rekomendasi ilmiah yang konkret. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun model pengelolaan sampah mandiri yang efektif, integratif, dan berkelanjutan di tingkat perdesaan..

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif sederhana. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Wonomulyo secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Sidodadi memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi serta menghasilkan timbulan sampah yang cukup besar dibandingkan desa-desa lainnya di Kecamatan Wonomulyo.

Data primer adalah data yang didapat secara langsung melalui survei terhadap kinerja pengelolaan persampahan di Desa Sidodadi kecamatan Wonomulyo, dalam mendapatkan data-data yang diinginkan peneliti melakukan kuesioner dan dokumentasi. Sedangkan sumber sekunder adalah data yang didapat dan dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada..

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek penelitian. Pengertian lain dari populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulan (Wiratna Sujarweni 2014).

Dalam penelitian ini sampel dibutuhkan untuk penyebaran kuesioner kepada responden yang dianggap mewakili populasi. Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Widodo, 2017). sampel penduduk meliputi setiap Kelurahan dan Desa yang terdapat di Kecamatan Wonomulyo berdasarkan dari data masyarakat yang membuang sampah yang menetap di Kecamatan Wonomulyo, Jika nilai kritis atau batas ketelitian yang diinginkan sebesar 1% maka jumlah responden sebesar 400 dari jumlah populasi 10.961.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berada pada kategori baik, yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata pada seluruh indikator peran masyarakat yang berada pada rentang 3 hingga Tingginya nilai tersebut mencerminkan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki kesadaran, tetapi juga telah mengimplementasikan perilaku pengelolaan sampah dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyediakan tempat sampah, melakukan pemilahan, memanfaatkan fasilitas TPS, serta berpartisipasi dalam pembayaran iuran dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penelitian, aspek teknik operasional berada pada kategori rendah dengan nilai rata-rata 1,90 yang menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal, terutama pada tahapan pewadahan, pengumpulan, pengolahan 3R, dan pengangkutan. Aspek peran masyarakat berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 3,08 yang mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat telah tergolong tinggi. Sementara itu, aspek regulasi dan pengawasan berada pada kategori cukup dengan nilai rata-rata 2,64, yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap regulasi sudah relatif baik, namun implementasi fungsi pengawasan masih belum optimal.

Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan kinerja antar aspek dalam sistem pengelolaan sampah, di mana aspek sosial telah berkembang dengan baik, tetapi belum diimbangi oleh aspek teknis operasional dan kelembagaan yang memadai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama terletak pada efektivitas implementasi sistem dan mekanisme pengendalian di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu model rekayasa sistem pengelolaan sampah yang bersifat terintegrasi untuk mengoptimalkan keseluruhan aspek secara simultan. Model yang diusulkan dalam penelitian ini merupakan model pengelolaan sampah berbasis masyarakat terintegrasi, yang merekayasa hubungan antara aspek teknis operasional, partisipasi masyarakat, serta regulasi dan pengawasan dalam satu sistem yang saling mendukung. Model ini diarahkan untuk memperkuat kelemahan pada aspek operasional dan pengawasan, sekaligus memanfaatkan tingginya partisipasi masyarakat sebagai basis utama keberhasilan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dengan demikian, model rekayasa yang diusulkan tidak hanya berfungsi sebagai alternatif teknis, tetapi juga sebagai pendekatan sistemik yang mengintegrasikan dimensi sosial, teknis, dan kelembagaan dalam satu kesatuan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Berdasarkan hasil perumusan model pengelolaan persampahan yang diusulkan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah sangat bergantung pada pendekatan sistemik yang bersifat integratif. Model ini tidak hanya berfokus pada satu dimensi, melainkan mensinergikan aspek teknis operasional, partisipasi sosial, hingga regulasi dan pengawasan. Integrasi antar-elemen ini menjadi krusial karena permasalahan persampahan di lapangan seringkali gagal diselesaikan akibat pendekatan kebijakan yang terfragmentasi. Dengan mengawinkan pendekatan *top-down* dari sisi regulasi pemerintah dan *bottom-up* dari sisi akar rumput, model ini terbukti lebih relevan secara empiris.

Lebih lanjut, dari segi aplikabilitas dan intervensi praktis, model ini menawarkan solusi terarah terhadap kelemahan aspek teknis operasional yang

sebelumnya teridentifikasi berada pada kategori rendah. Optimalisasi yang dilakukan melalui perbaikan sistem pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) menjadikan kerangka kerja ini sangat berorientasi pada penyelesaian masalah nyata (problem-solving). Agar intervensi teknis dan partisipasi masyarakat ini tidak bersifat sementara, model ini turut diperkuat oleh mekanisme kelembagaan dan pengawasan yang jelas. Adanya instrumen kontrol regulasi yang terukur memastikan bahwa kepatuhan dan konsistensi implementasi kebijakan di tingkat masyarakat dapat terjaga kelangsungannya.

Pada akhirnya, signifikansi dari pemodelan persampahan ini terletak pada sifatnya yang adaptif dan berkelanjutan (*sustainable*). Fleksibilitas model dalam mengakomodasi karakteristik dan kondisi lokal, serta potensinya untuk terus dikembangkan sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat, menjadikannya sebuah rancangan yang relevan untuk jangka panjang. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja pengelolaan persampahan tidak dapat dicapai semata-mata melalui pemutakhiran infrastruktur fisik, melainkan menuntut pembangunan ekosistem yang komprehensif—di mana infrastruktur yang memadai, kapasitas masyarakat yang berdaya, serta ketegasan institusional dapat bekerja secara berkesinambungan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dari itu peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa Sidodadi masih belum memadai. Hal ini ditunjukkan oleh hasil kuesioner pada aspek pewadahan dan ketersediaan TPS, di mana sebagian besar responden menyatakan kondisi tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Keterbatasan fasilitas ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pengelolaan sampah di tingkat lingkungan. Meskipun demikian, pada tingkat rumah tangga, masyarakat telah menunjukkan kesadaran dengan menyediakan tempat sampah secara mandiri.
2. Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Sidodadi belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum teraturnya sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah belum berjalan secara rutin, serta penerapan prinsip 3R masih sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan yang ada masih bersifat konvensional dan belum terorganisir dengan baik.
3. Model pengelolaan sampah yang efektif adalah model berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan dukungan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki tingkat partisipasi yang cukup baik dalam pengelolaan sampah, namun belum didukung oleh sistem dan fasilitas yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Damanhuri, Enry. 2010. Diklat Kuliah TL *Pengelolaan Sampah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung
2. Dinas lingkungan hidup dan kehutanan, *pengelolaan persampahan tahun 2020-2024*
3. INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah." 2008.
4. Irman, 2004, *Peran Serta Masyarakat Dalam teknik Operasional Sampah di Kota*
5. Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat Dinas Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan 2022
6. Kurnianingsih, F., Zulkarnain, I., & Okparizan, O. 2022. *Social Engineering Attempt with Inter-Organization Participation of Waste Bank Program in Batam City*. Researchgate.Net, 6(3), 64–69.
7. Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. (2013). *Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan*.
8. Marliani, N. (2014). *Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga (Sampah Anorganik) Sebagai Bentuk Implementasi Dari Pendidikan Lingkungan Hidup*, Jurnal Formatif, Vol. 4 (2): 124-132, 2014
9. Wulandari, D., Utomo, S. H., & Narmaditya, B. S. (2017). *Waste bank: Waste Management Model in Improving Local Economy*. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 7(3), 36–41.
10. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. (2018). *Laporan Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018*. Polewali Mandar: Dinas Lingkungan Hidup / Pokja Sanitasi Kabupaten Polewali Mandar.
11. Nugroho, Panji. 2013. *Panduan Membuat Kompos Cair*. Jakarta:Pustaka Baru
12. Nurmayadi, Dicky, and Agi Rivi Hendardi. "Pengelolaan Sampah Dengan Pendekatan Behavior Mapping Di Pasar Tradisional Kota Tasikmalaya." *Jurnal Arsitektur Zonasi* 3.1 2020: 45-52.
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 *Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*
14. Peraturan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar No 4 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Persampahan*
15. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. No 4 Tahun 2018. *Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah*
16. Spesifikasi Timbulan Sampah untuk kota Kecil dan Sedang, SK SNI S-04-1993-03, Yayasan LPMB Bandung, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. *Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*
17. Thoha, M. Chabib. *Teknik Evaluasi Pendidikan PT. raja Grafindo*: Jakarta, 2005.
18. Umar, Husein, 2013, *Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.